



KR-Antara/Muhammad Adimaja

PENGUNGKAPAN KOSMETIK ILEGAL: Petugas memeriksa barang bukti kosmetik ilegal hasil intensifikasi pengawasan kosmetik BPOM tahun 2025 di Jakarta, Jumat (21/2/2025). BPOM menyita hasil temuan kosmetik berbahaya dan ilegal atau tanpa izin edar rentang 10-18 Februari 2025, berupa 91 nama kosmetik dan 4.334 item dengan total nilai Rp 31,7 miliar.

YOGYAKARTA PALING BESAR NILAINYA

Dua Modus Baru Penyebaran Kosmetik Ilegal

JAKARTA (KR) - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkap dua modus baru penyebaran kosmetik berbahaya dan ilegal tanpa izin edar yang selama ini dipasarkan pelaku melalui media sosial maupun daring.

"Ada produk yang tertulis nomor izin edar, tetapi bukan yang dikeluarkan BPOM, bukan pabrik tersebut yang membuat, tetapi pabrik lain yang ditiru produk kosmetiknya, kemudian dia distribusikan secara massal," kata Kepala BPOM Taruna Ikrar di Kantor BPOM, Jakarta, Jumat (21/2).

Taruna melanjutkan, modus kedua yakni mengelabui konsumen menggunakan etiket biru. Sebagian besar produk yang ilegal tersebut (60 per-

sen) didominasi oleh produk-produk impor. "Etiket biru, dia pakai tanpa izin edar (TIE), itu adalah bagian untuk mengelabui konsumen dan kita akan serius menindaknya," ujarnya.

Ia memaparkan, berdasarkan hasil temuan produk kosmetik ilegal dari hasil intensifikasi produk selama 10-18 Februari 2025, Kota Yogyakarta paling banyak nilai ru-piahnya, yakni sebesar Rp 11,2 miliar.

"Kemudian Jakarta sebesar Rp 10,3 miliar, Bogor lebih

dari Rp 4,8 miliar, Palembang mencapai Rp 1,7 miliar, dan Makassar Rp 1,3 miliar," ucapnya.

Total nilai temuan yakni 91 merek yang sebagian besar merupakan produk impor, yang terdiri dari 4.334 item dengan 205.133 buah kosmetik dengan nilai ekonomi sebesar lebih dari Rp 31,7 miliar.

Dari 91 merek tersebut, 17,4 persen mengandung bahan berbahaya, termasuk perawatan kulit atau skincare ber-etiket biru yang tidak sesuai ketentuan; 79,9 persen tanpa izin edar; 0,1 persen produk injeksi kecantikan; dan 2,6 persen kedaluwarsa.

Taruna menegaskan, pihaknya terus melakukan pengawasan dan penindakan de-

ngan berkolaborasi bersama berbagai pihak, termasuk Kepolisian. "Kami memperhatikan apa yang terjadi di media sosial, meski dengan keterbatasan efisiensi anggaran, kita akan terus bekerja optimal," tuturnya.

Ia juga memaparkan, dari kasus yang telah ditemukan, empat di antaranya yakni di wilayah Bogor, Makassar, Manado, dan Rejang Lebong akan diproses projusticia karena ada indikasi pidana.

"Sedangkan kasus yang lain akan kami kenakan sanksi administratif berupa perintah penarikan, pemusnahan, pencabutan izin edar, dan penghentian sementara kegiatan," demikian Taruna Ikrar.

(Ant/San)-d

SENIN, OPERASI PASAR DI 500 TITIK

Presiden: Turunkan Harga Sembako

JAKARTA (KR) - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menteri untuk menurunkan harga-harga sembako dan sejumlah komoditas menjelang bulan Ramadan yang diperkirakan jatuh pada awal Maret 2025.

Dalam acara makan siang bersama dengan sejumlah menteri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2), Presiden meminta harga-harga sembako itu harus lebih murah dibandingkan Ramadan tahun lalu dan untuk beberapa komoditas harganya harus lebih murah daripada harga di Malaysia.

"Pak Presiden ingin bring down the price (me-

nurunkan harga), harus lebih murah dari (Ramadan) tahun lalu dan beberapa item harus lebih murah dari Malaysia," kata Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono saat ditemui selepas acara makan siang di Kompleks Istana Kepresidenan.

Oleh karena itu, Sudaryono menyebut Kementerian Pertanian pada Senin besok (24/2) bakal menggelar operasi pasar di 500-an titik di berbagai daerah di Indonesia. Targetnya, titik-titik yang menjadi sasaran operasi pasar bertam-bah menjadi 4.000 pada awal puasa.

"Kita bisa lakukan operasi pasar beras, minyak goreng, gula pasir, ba-

wang merah, bawang putih, daging termasuk," kata Wamentan Sudaryono.

Ia optimistis kementeriannya mampu memenuhi perintah Presiden menurunkan harga-harga sembako menjelang Ramadan.

Selain Wamentan, beberapa menteri dan pejabat lainnya juga ikut acara makan siang bersama Presiden. Pejabat-pejabat yang makan siang bersama Presiden, kemarin yaitu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P Roeslani. (Ant)-f

DUGAAN PEMERASAN OLEH NIKITA MIRZANI Polisi Amankan Barang Bukti

JAKARTA (KR) - Polda Metro Jaya telah memeriksa 13 orang saksi terkait kasus dugaan pengancaman dan pemerasan yang dilakukan oleh artis Nikita Mirzani terhadap seorang dokter berinisial RG. Selain memeriksa para saksi, penyidik juga telah meminta keterangan dari lima saksi ahli.

"Perkembangan penyidikan terhadap dugaan pengancaman dan pemerasan menggunakan transaksi elektronik serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga dilakukan IM dan NM telah memeriksa sebanyak 13 orang saksi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi di Jakarta, Jumat (21/2).

Ade Ary juga menyebutkan telah mengamankan sejumlah barang bukti dalam kasus ini. "Bukti dokumen surat sebanyak sembilan, bukti transfer uang dari korban, bukti tangkapan layar per-

cakapan, bukti pembayaran untuk cicilan, bukti keterangan transfer/pengiriman uang, fotokopi Pengikatan Jual Beli (PPJB), tanda bukti pemesanan," ungkapnya.

Selanjutnya bukti barang digital yaitu lima disket flash (flash disk) yang berisi dokumen elektronik, delapan telepon genggam yang memiliki keterkaitan sebagai sistem elektronik yang mentransmisikan dokumen elektronik dalam perkara yang ditangani penyidik. "Juga bukti hasil ekstraksi barang digital yaitu tiga berkas dokumen sebagai dokumen hasil analisa forensik terhadap barang bukti digital yang ditemukan," terang Ade Ary.

Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani dan asistennya berinisial IM sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap seorang dokter berinisial RG. (Ant/Has)-d

HUKUMAN KORUPTOR EMAS ANTAM DIPERBERAT Crazy Rich Surabaya Divonis 16 Tahun

JAKARTA (KR) - Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman terhadap Budi Said selaku pengusaha yang kerap dijuluki sebagai Crazy Rich Surabaya menjadi 16 tahun penjara. Budi sebelumnya divonis 15 tahun penjara terkait kasus korupsi jual beli logam mulia emas PT Antam Tbk.

Hakim Ketua PT DKI Jakarta Herri Swantoro menyatakan, hukuman Budi Said diperberat setelah pihaknya menerima permintaan banding yang diajukan penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa. "Mengubah amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sekadar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan," kata Hakim Ketua dalam salinan putusan banding yang diterima di Jakarta, Jumat (21/2).

Sementara terkait pidana denda, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menetapkan besaran denda yang dikenakan kepada Budi Said tetap sebesar Rp 1 miliar dengan ketentuan diganti dengan (subsider) pidana kurungan selama 6 bulan. Namun pada pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, Majelis

Hakim menambahkan hukuman Budi Said berupa pembayaran 1.136 kilogram emas Antam atau setara Rp 1,07 triliun, berdasarkan Harga Pokok Produksi Emas Antam per Desember 2023 atau setidaknya setara dengan nilai emas pada saat pelaksanaan eksekusi dengan memperhitungkan dana provisi yang dibukukan dalam laporan.

Dengan demikian, hukuman itu menambah pidana uang pengganti yang awalnya hanya berupa 58,841 kg emas Antam atau setara dengan Rp 35,53 miliar kepada Budi Said. "Apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Tetapi apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 tahun," tambah Hakim Ketua.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Budi Said dengan pidana 15 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider pidana kurungan 6 bulan, serta pidana tambahan uang pengganti sebesar 58,841 kg emas Antam atau Rp 35,53 miliar subsider 8 tahun penjara. (Ant/Has)-f

Terkait Penipuan, 19.980 Rekening Diblokir

JAKARTA (KR) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, 28 persen dari 70.390 rekening terkait penipuan (scam) yang dilaporkan ke Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), atau sebanyak 19.980 rekening, diblokir hingga 9 Februari 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (KE PEPK) OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan, sejak beroperasi pada 22 November 2024, IASC telah menerima 42.257 laporan kasus penipuan per 9 Februari 2025.

"Jumlah rekening terkait penipuan yang dilaporkan sebanyak 70.390 dan dari jumlah rekening tersebut sejumlah 19.980 telah dilakukan pemblokiran atau 28 persen," katanya di Jakarta, Jumat (21/2).

Sementara itu, ia menuturkan jumlah kerugian dana yang dilaporkan korban sebesar Rp 700,2 miliar dan jumlah dana korban yang

telah diblokir senilai Rp 106,8 miliar.

Friderica Widyasari Dewi mengatakan, IASC didirikan OJK bersama Anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) yang didukung asosiasi di industri jasa keuangan untuk penanganan penipuan yang terjadi di sektor keuangan secara cepat dan menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

Friderica menyatakan, pembentukan IASC bertujuan untuk mempercepat koordinasi antarpemilihan jasa keuangan dalam penanganan laporan penipuan dengan melakukan penindakan transaksi dan pemblokiran rekening terkait penipuan.

Kemudian, penyedia jasa keuangan melakukan identifikasi para pihak yang terkait penipuan, mengupayakan pengembalian dana korban yang masih tersisa, dan melakukan upaya penindakan hukum.

Menurutnya, pembentukan forum koordinasi tersebut dilakukan untuk

merespons semakin maraknya penipuan di sektor keuangan dan semakin besarnya nominal dana korban yang hilang.

"Saat ini IASC telah didukung asosiasi industri perbankan, penyedia sistem pembayaran, dan e-commerce. IASC akan terus meningkatkan kapasitasnya mempercepat penanganan kasus penipuan di sektor keuangan," imbuh Friderica.

Dalam rangka pelindungan konsumen, OJK juga telah menerima 16.610 pengaduan terkait entitas ilegal melalui Satgas PASTI sejak 1 Januari 2024 hingga 31 Januari 2025, terdiri dari 15.477 pengaduan mengenai pinjaman online ilegal dan 1.133 pengaduan terkait investasi ilegal.

Adapun pinjaman online ilegal dan penawaran investasi ilegal yang telah dihentikan masing-masing sebanyak 3.517 entitas dan 519 entitas sejak 1 Januari 2024 hingga 24 Januari 2025. (Ant/San)-f

TAMPUNG WARGA PALESTINA

Rumah Modular Masuk Gaza

ISTANBUL (KR) - Pengiriman pertama rumah modular dari Mesir menuju Jalur Gaza dimulai pada Kamis (20/2) di bawah kesepakatan gencatan senjata dengan Israel. Saluran televisi Mesir, Al-Qahera News melaporkan, sebanyak lima truk yang membawa 15 rumah modular dan satu bulldoser melintasi perbatasan Mesir melalui Rafah menuju terminal Kerem Shalom (Karam Abu Salem) sebelum diizinkan masuk ke Gaza.

Saluran tersebut juga menayangkan rekaman yang memperlihatkan truk-truk yang mengangkut rumah modular bergerak dari perbatasan Rafah menuju terminal Kerem Shalom. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari otoritas Palestina di Gaza.

Selama beberapa pekan, pihak Zionis Israel menolak mengizinkan masuknya rumah modular ke Gaza sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata untuk menampung warga Palestina yang mengungsi di tengah cuaca dingin. Namun, para mediator akhirnya turun tangan untuk menegakkan kesepakatan tersebut.

dan pertukaran tahanan mulai berlaku bulan lalu, menghentikan sementara perang genosida brutal oleh pasukan Israel yang telah menewaskan hampir 48.300 warga Palestina dan menghancurkan wilayah Gaza.

Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkap-

an terhadap pemimpin otoritas Israel, Benjamin Netanyahu, serta mantan kepala otoritas pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait perang yang dilancarkan-



KR-Antara/Anadolu

Rumah modular untuk warga Jalur Gaza.

DUGAAN SUAP PEMILIHAN KETUA DPD KPK Bakal Klarifikasi Para Senator

JAKARTA (KR) - Laporan dugaan suap terkait proses pemilihan ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2024-2029 saat ini sedang diverifikasi oleh tim Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM). Hasil verifikasi tersebut nantinya akan dipaparkan dan ditetapkan apakah laporan dugaan suap tersebut bisa ditingkatkan ke tahap selanjutnya.

"DPD ya? DPD sekarang tahapannya sedang diverifikasi dan divalidasi oleh tim PLPM. Harapannya proses itu bisa ditentukan apakah menjadi kewenangan KPK, kemudian apakah menyangkut penyelenggara negara," kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto di Jakarta, Jumat (21/2).

Setyo mengatakan tak tertutup kemungkinan untuk memanggil para senator untuk mengklarifikasi soal laporan dugaan korupsi tersebut. "Beberapa saksi yang mengetahui atau bahkan mengalami secara langsung, mendengar, nah itu pasti (keterangannya) dibutuhkan oleh para tim penyidik dan dumas (pengaduan masyarakat)," ujarnya.

Setyo menegaskan KPK akan terus memberantas tindak pidana korupsi tanpa

memandang jabatan dan kedudukan pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

"Kami menempatkan semua perkara tentunya sama. Kalau misalnya tahapan verifikasi dan validasi itu yang dilakukan dumas akurat, ya kami juga memastikan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum," tegasnya.

Untuk diketahui, seorang mantan staf DPD bernama Fithrat Irfan melaporkan ke KPK soal dugaan suap kepada 95 senator atau anggota DPD terkait pemilihan ketua DPD periode 2024-2029.

"Indikasinya itu beliau menerima dugaan suap dari untuk kompetisi pemilihan ketua DPD dan wakil ketua MPR unsur DPD. Itu melibatkan 95 orang yang ada, anggota dewan yang ada di DPD dari 152 totalnya," kata Irfan di Gedung Merah Putih KPK.

Irfan menyebut ada anggota DPD diduga mendapat 13 ribu dolar Amerika Serikat (AS). Uang sebesar 5 ribu dolar AS untuk memberikan suara pada pemilihan ketua DPD, sementara 8 ribu dolar AS lainnya untuk pemilihan wakil ketua MPR dari unsur DPD. Uang itu diserahkan secara door to door ke tiap ruangan anggota DPD. (Ant/Has)-f